

KOMITE PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM (KPSI) SUMATERA BARAT  
(2006-2009)

SKRIPSI

*Diajukan kepada Panitia Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas sebagai  
Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sejarah*

Oleh :

RUDI HARTONO

05 181 023



JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010

## Abstrak

Skripsi ini berjudul Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Sumbar 2006-2009. Setelah berakhirnya masa sistem monolitik-sentralistik Orde Baru, maka terciptalah peluang bagi gerakan organisasi massa yang dulunya mengusung ide dan wacana berseberangan dengan rezim yang berkuasa selama tiga puluh tahun. Peluang ini direspon di seluruh Indonesia dan tidak terkecuali di Sumatera Barat (Sumbar). Di Sumbar peluang ini direspon dengan Konsep “Kembali ke Nagari berbasis Surau” yang berdasar kepada “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABSSBK). ABSSBK ini yang digunakan KPSI Sumbar guna menggabungkan dua kekuatan besar dalam masyarakat guna mewujudkan visi “penegakkan syariat Islam sebagai sumber hidup secara menyeluruh di Bumi Ranah Minang Sumatera Barat”. Untuk mencapai keinginannya KPSI Sumbar melakukan pemurnian ajaran agama. Pemurnian ajaran agama yang dimaksud KPSI adalah menerapkan ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan metode khas KPSI. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi “Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Sumbar 2006-2009” ditulis.

Skripsi menggunakan metode penulisan sejarah, yang terdiri dari empat tahap. *Pertama*, tahap heuristik, atau pengumpulan sumber baik primer dan sekunder. Tahap pengumpulan data dalam tahapan ini banyak hambatan yang dilalui khususnya sewaktu melakukan studi wawancara terhadap pejabat tinggi KPSI Sumbar baik dewan syuro ataupun ketua umumnya dan kesulitan mendapatkan arsip KPSI. *Kedua*, tahap kritik yang terdiri dari kritik ekteren dan interen, tahapan adalah tahap menganalisis baik dari segi ejaan dan hasil yang ditemukan dalam studi wawancara dan tentunya dari bahan primer. *Ketiga*, interpretasi, adalah tafsiran terhadap data yang sudah melalui pengkritikan. *Keempat* historiografi (penulisan sejarah).

Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa ada perubahan yang sangat fundamental yang mempengaruhi bentuk, dan konsep gerakan Islam di Sumbar khususnya, dengan contoh kongkret aktivitas KPSI yang ingin memurnikan pemahaman dan penghayatan ajaran umat Islam. Menurut KPSI pemahaman dan penghayatan yang telah bercampur dengan budaya asing yang di luar Islam. Dari tahun 2006 - 2009 banyak kegiatan KPSI yang dilakukan untuk mewujudkan keinginannya ini, baik dengan jalan yang sistematis bersama dengan Ormas, Forum di KPSI, atau bersifat insidentil dengan menindaklanjuti apa yang menurut mereka tidak Islami atau menyimpang dari syariat Islam seperti demonstrasi anti-Ahmadiyah, pembubaran Pusat Kajian Antar Komunitas (Pusaka) Sumbar.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPSI Sumbar mempunyai standar ganda dimana secara politis menjelaskan bahwa ingin menerapkan gerakan pemerintah daerah yakni ABSSBK, namun pada tataran realisasinya jauh berbeda karena visi KPSI Sumbar adalah menegakkan Syariat Islam di Bumi Ranah Minang (Sumatera Barat).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arah baru sejarah di Indonesia mulai hadir di saat runtuhnya sistem monolitik-sentralistik dari Orde Baru (Orba).<sup>1</sup> Runtuhnya rezim ini membuat perubahan dari segala bidang seperti di bidang sosial, politik, budaya maupun di bidang keagamaan. Di bidang sosial terjadi pemberian hak dan wewenang yang sewajarnya kepada masyarakat dalam berpendapat dan bergerak sedangkan dalam bidang politik diberikannya peluang bagi masyarakat untuk mendirikan organisasi menentukan hak dalam berpolitik, tidak terkecuali dalam bidang keagamaan.

Di bidang keagamaan perubahan juga terjadi seperti terbukanya peluang bagi mendirikan masyarakat untuk mendirikan organisasi dan menentukan landasan bergerak sendiri, yang sebelumnya mengalami pengontrolan dari rezim Orba secara sistemik. Lengsernya Orba menjadi sebuah awal dari gerakan keagamaan yang ada di Indonesia. Reformasi yang memberikan peluang dan landasan bergerak secara legal-formal bagi organisasi, masyarakat dan individu untuk mengemukakan pendapat dan bergerak. Wujud dari peluang itu menghasilkan berbagai merespon dari masyarakat.

Jiwa zaman pada masa ini adalah ingin selalu melawan hegemoni<sup>2</sup> pusat menyebar hingga ke seluruh penjuru Indonesia, yang menurut Taufik Abdullah memaparkan bahwa, fenomena ini menjelaskan setiap terjadi pergantian antara satu dan rezim lain menimbulkan gejala eforia. Eforia adalah perasaan dari masyarakat yang hadir lewat suasana hati yang

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 176-178.

<sup>2</sup> Menurut Antonio Gramsci hegemoni adalah suatu tindakan patuh yang aktif dari kelompok yang didominasi oleh penguasa lewat kepemimpinan intelektual, moral dan politik. Gagasan Gramsci ini adalah masih dari mensintesakan konsep Hegel yakni tentang kekuatan ide dengan konsep Marx tentang gerakan berlandaskan masalah ekonomi, menjadi gerakan yang disebabkan oleh hegemoni ideologis. Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (eds), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 16.

berhadapan dengan berbagai corak diakibatkan oleh format politik baru telah semakin memperlihatkan bentuknya yang terefleksi lewat tindakan nyata.<sup>3</sup>

Format politik baru yang menginginkan wewenang yang sewajarnya untuk mengurus rumah tangga sendiri menyebar di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Sumbar. Sumbar yang melihat peluang dari format baru dengan keluarnya UU No 22 tahun 1999 ini dapat mengembalikan konsep ideal tentang unit pemerintahan terkecil yakni nagari yang sebelumnya diseragamkan. Undang-undang ini memberikan peluang kepada daerah untuk meninjau kembali tentang unit pemerintahan terendah. Kemudian dikuatkan lewat Perda No. 9 tahun 2000. Keadaan ini mengusung semangat “Kembali ke Nagari berbasis Surau.” Gerakan ini semarak di seluruh Sumatera Barat dan dilain sisi melahirkan organisasi yang mengatakan diri selaras dengan semangat ini walaupun perlu dipertanyakan.

Tepatnya tanggal 28 Juli 2006 Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Sumbar berdiri dan bertujuan mengikrarkan sebagai organisasi kemasyarakatan yang ingin meluruskan dan memberikan contoh kongkret bagaimana selayaknya menjadi umat Islam seutuhnya yang menurut KPSI Sumbar berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Karena berpegang pada Al-Quran dan Hadis membuat setiap gerakan KPSI seperti Safari Dakwah makin menemukan landasan yang benar.

Sejarah gerakan pemurnian bukan cerita baru, dan telah berlangsung lama. Tulisan H. A. Steijn Parve, tentang gerakan Paderi yang dilakukan oleh kaum agama dengan judul “Kaum Pidari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera” dalam Taufik Abdullah (Ed) menjelaskan tentang pemurnian agama lewat Gerakan Paderi. Temuan baru dari tulisan ini yakni penulis mampu menjelaskan bahwa bukan saja alasan struktural yang menyebabkan gerakan Paderi terjadi namun masalah kultural yakni tentang nilai-nilai juga melandasinya.

---

<sup>3</sup> Taufik Abdullah “Konflik Disintegratif dan Harapan akan Reformasi dalam Nasionalisme dan Sejarah,” dalam *Nasionalisme dan Sejarah*, Nina H. Lubis, (Ed), (Bandung : Satya Historika, 2001), hlm. 160 – 171.

Pada abad ke-20 gerakan pemurnian Islam dimulai dengan lahirnya kaum muda. Kaum muda adalah sebutan yang diberikan kepada tokoh yang ingin memadukan antara metode pengajaran barat dengan sistem timur dalam satu kesatuan yang sebelumnya tidak pernah ada yang mengerjakannya. Gerakan kaum muda ini pada gilirannya dikelompokkan menjadi gerakan pemurnian. Gerakan pemurnian ini mencoba mengakomodir kemajuan dan perkembangan Eropa dengan memasukkan unsur pengetahuan umum selain agama dan sistem belajar yang tidak lagi menggunakan sistem halaqah. Gerakan modernisme Islam ini dipelopori oleh Haji Ahmad Karim Amarullah (Haka),<sup>4</sup> Abdullah Ahmad,<sup>5</sup> Zainuddin Labai<sup>6</sup> dan Ahmad Dahlan.<sup>7</sup> Selain itu, persoalan yang menjadi titik tolak dari gerakan abad ke-20 adalah praktik-praktik ritual umat Islam yang terlalu berlebihan dan cenderung makin mempersulit diri, seperti penghargaan berlebihan kepada kiayi dan mendatangi kuburan kiayi yang dianggap saleh lalu memohon lewat perantaranya.

Gerakan Muhammadiyah melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam disebabkan karena masih banyak ajaran dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti menempatkan kiayi sebagai perantara untuk memohon sesuatu kepada Tuhan yang dijalankan oleh umat Islam. Adanya taqlid buta terhadap kiayi dan masih kuatnya budaya Hindu-Budha dalam kehidupan masyarakat.

Gerakan Muhammadiyah melakukan pemurnian dalam penghayatan keagamaan. Buku A Jainuri menulis tentang *Muhammadiyah: Gerakan Reformasi Islam di Pulau Jawa Pada Awal Abad Keduapuluh* menjelaskan tentang gerakan Muhammadiyah, berupa penjelasan tentang latar belakang gerakan Muhammadiyah, di Jawa. Buku ini menerangkan

---

<sup>4</sup> Haji Abdul Karim Amarullah (HAKA) dikenal dengan Haji Rasul yang dilahirkan di Maninjau, ia adalah orang tua dari Hamka, untuk jelasnya HAMKA, *Ajahku : Riwayat hidup Haji Abd, Karim Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama*, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1958).

<sup>5</sup> Abdullah Ahmad lahir di Padang Panjang pada tahun 1906 menjadi guru dan mendirikan cikal bakal sekolah Adabiah. Taufik Abdullah, *Sekolah dan Politik: Gerakan Kaum Muda di Sumatera 1927 - 1933*, terj. Lindayanti dan A. Guntur, (Padang: ATP, 1988).

<sup>6</sup> Zainuddin Labai lahir di Padangpanjang dan ia menjadi seorang guru di Diniyah Padangpanjang. Ibid..

<sup>7</sup> Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah salah satu dari tiga orang yang mempunyai jaringan intelektual dengan gurunya di Mekah yakni Syekh Katib al Minangkabau. HAMKA, op.cit. hlm. 7.

tentang peranan latarbelakang pendidikan, keluarga yang melahirkan pandangan Ahmad Dahlan. Serta pro-kontra terhadap gerakan Muhammadiyah.

Gerakan pemurnian Islam berlanjut yang diwakilkan oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang landasan bernegara menurut Islam. Gagasan Nurcholish Madjid tentang Islam dan negara dapat dibaca melalui Skripsi Yudhi Andoni, "Pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan Negara tahun 1970 – 2003". Skripsi ini berisi tentang latarbelakang lahirnya gagasan Nurcholish.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pemurnian dalam Islam tidak hanya terjadi sekarang saja namun telah menyejarah bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun terjadi berbagai perbedaan metode dari setiap zamannya karena masing-masing zaman punya karakteristik berbeda-beda dan hal ini yang membuat respon dari para pemurni ajaran Islam juga berbeda. Seperti gerakan Paderi identik dengan gerakan tradisional yang sangat mengadakan sosok seorang pemimpin yang karismatik bahkan Paderi mempunyai pendanaan sendiri lewat usaha-usaha yang dilakukannya di Pantai Timur Sumatera.

Pada tahun 2006 gerakan pemurnian Islam di Sumbar dilakukan oleh Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) dengan metode pemurnian yang berbeda dari Paderi, Muhammadiyah dan gerakan Nurcholish dan kawan-kawan dengan pengadaran umat yang salahkaprah di tempat kejadian. Paderi melakukan metode pemurnian dengan jalan yang penghancuran, pembunuhan, sedangkan KPSI Sumbar mengusir, mendakwahi dengan pengerahan massa seperti Pantai Padang, Bukit Lampu dengan menghadirkan massa puluhan orang. Karena perbedaan metode dan keberlanjutan dari gerakan pemurnian Islam inilah maka penelitian yang judul, "Komite Penegakkan Syariat Islam (KPSI) Sumbar 2006-2009" diteliti.

## **B. Batasan dan Perumusan Masalah**

Batasan awal adalah tahun 2006 dimana KPSI mengikrarkan diri sebagai organisasi yang ingin menegakkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang sesuai pemahaman KPSI Sumbar yang didideklaraikan oleh Abu Bakar ba'asyir.

Batasan akhir penelitian ini adalah tahun 2009. Tahun 2009 banyak aktivitas mulai terlihatnya nyata dalam menegakkan visi KPSI yakni “terwujudnya penegakkan syariat Islam sebagai sumber hukum secara kaffah (menyeluruh) di Bumi Ranah Minang.”

Demi menegakkan syariat Islam di Ranah Minang. KPSI mulai juga membubarkan kegiatan *valentine day*, lomba ungkapkan cinta dan sebagainya. Sebelumnya pengusiran terhadap aliran sesat seperti Ahmadiyah dan aksi pembubaran Pusat Studi antar Komunitas.

Guna menspesifikasikan penelitian ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan pokok.

1. Bagaimana latar belakang sosial-politik yang dapat menyebabkan lahirnya KPSI Sumbar?
2. Bagaimana hubungan KPSI dengan Organisasi Pendirinya yang bergerak di bidang keagamaan dan adat baik ditingkat nasional juga lokal dan bagaimana hubungan KPSI dengan Pemda dan MUI Sumbar?
3. Bagaimana metode yang dilakukan KPSI dalam pemurnian ajaran Islam di Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan penelitian ini bertujuan. Pertama, menjelaskan bagaimana kondisi sosial-politik yang mampu mempengaruhi arah, pola gerakan keIslaman, dan bentuk gerakan keIslaman di Sumbar. Kedua, organisasi-organisasi apa yang mendirikan KPSI Sumbar. Ketiga, menjelaskan bagaimana KPSI Sumbar melakukan aktivitas pemurnian dalam ajaran Islam di Sumbar.

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana aktivitas gerakan pemurnian ajaran agama Islam yang terutama digerakkan oleh KPSI Sumbar.

#### **D. Kerangka Analisis**

Dalam melihat gerakan yang diusung oleh KPSI Sumbar maka konsep yang dipakai untuk menjelaskan latar belakang berdirinya KPSI maka konsep hubungan agama dan negara yang digunakan. Kedua konsep ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi setiap waktu sehingga di setiap zaman antarsatu dan lainnya mempunyai respon, yang berbeda.

Gerakan pemurnian Islam menurut Fazlur Rahman<sup>8</sup> dibagi beberapa bagian. *Pertama*, kaum pemurnian pramoderenisme yang muncul pada abad ke-18 dan pada abad ke-19 di Arabia, India dan di daerah lain. *Kedua*, moderenisme klasik yang bersumber atau bertitik tolak pada gagasan dan metodologi Barat yang berkembang. Ciri khas ini berkembang pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. *Ketiga*, neo-revivalisme muncul awal abad ke-20. *Keempat*, neo-moderenisme yang muncul pada akhir abad ke 20.<sup>9</sup>

Azyumardi Azra memberikan karakteristik dari gerakan pemurnian Islam awal. Karakteristik dari gerakan pemurnian ini cenderung normatif dalam tataran ide, idealistis dalam hal capaian, ahistoris dalam artian pemahaman dan anti terhadap intelektual.<sup>10</sup> Akibat

---

<sup>8</sup> Fazlur Rahman adalah tokoh pemikir dari Pakistan, ia lahir di Hazara. Fazlur Rahman bisa dikatakan sebagai sosok yang cukup banyak memiliki murid di Indonesia, jaringan pemikirannya dapat dilihat dari beberapa tokoh pembaruan Islam seperti Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafii Maarif dan untuk lebih jelas autobiografi, Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar Diperjalananku*, (Yogyakarta, Ombak, 2006). Umumnya bila seseorang belajar di Universitas Chicago Amerika Serikat dan mengambil mata pejaran sejarah Islam akan berhadapan dengan tokoh yang pernah menetap di Kanada selama tiga tahun selambatnya sampai tahun 1988 karena bertepatan dengan tanggal 26 Juli ia meninggal di Illinois, Chicago. Salah satu bacaan yang cukup menarik mengenai gagasan Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam*, Peny. Ebrahim Moosa, (Jakarta, Rajawali Press, 2001).

<sup>9</sup> Yudhi Andoni. "Satu Islam Beda Pemahaman, Satu Iman bedan Jalan: Nurcholish Madjid dan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia," *Makalah* disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VII, Jakarta, 14-17 November 2006.

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, op.cit, hlm. 151 – 153.

dari ciri-ciri gerakan pemurnian Islam awal membuat setiap gerakan pemurnian selalu dianggap berada di luar masyarakat. Di luar masyarakat yang telah mengalami perubahan dan pengakulturasian dengan budaya.

Ahmad Syafii Maarif menguatkan bahwa gerakan pemurnian Islam awal yang berpegang teguh pada teks secara harfiah adalah gerakan ini tidak mau belajar pada sejarah seperti cita-cita ingin mewujudkan suasana dan kondisi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan empat khalifah padahal saat ini umat Islam masih terpuruk dan dikalahkan oleh agama lain dalam segi ilmu pengetahuan dan ekonomi bagaimana akan merealisasikannya sehingga perlu belajar untuk bisa mengalahkannya.<sup>11</sup>

Gerakan pemurnian keagamaan di Indonesia pertama kali dikenal dengan gerakan Paderi (1803-1837) yang menginginkan memurnikan keadaan masyarakat yang telah dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang sangat berseberangan atau bertentangan dengan ajaran Islam seperti sabung ayam, judi dan sebagainya.<sup>12</sup> Bahkan kesalahkaprahan itu disponsori oleh kaum adat sehingga kebiasaan yang salah ini, menjadi kebiasaan dan pada akhirnya dilakukan di tempat-tempat umum.<sup>13</sup> Latar belakang situasi sosial yang menyebabkan tiga haji yang sekembalinya dari ibadah haji ke Mekkah bergerak dan ingin merubah ini semua dengan aksi nyata, yakni pelarangan dan pembunuhan.

Hasil yang gemilang memang tidak didapat oleh gerakan Paderi seperti mengubah keadaan di Minangkabau secara fundamental. Namun secara sosial-politik kaum agama mulai mendapatkan sebuah ruang kekuasaan dalam masyarakat yang sebelum hanya mempunyai kekuasaan dalam lingkungan surau<sup>14</sup> sehingga setelah gerakan ini kaum agama mendapat

---

<sup>11</sup> Ahmad Syafii Maarif (ASM) adalah mantan ketua umum pusat Muhammadiyah setelah Amien Rais, berbeda dengan Amien Rais – ASM tidak terlalu tertarik dengan politik praktis seperti pendirian dari pendiri Muhammadiyah yakni Ahmad Dahlan. Ahmad Syafii Maarif, op.,cit.

<sup>12</sup> H. A. Steijn Parve, “Kaum Pidari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera” Taufik Abdullah (Ed), *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 147 – 176.

<sup>13</sup> Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah Sumatera Tengah 1784-1847*, Terj. Lillian D. Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 1992).

<sup>14</sup> Surau sebuah bangunan yang mempunyai makna dan unsur penting dalam masyarakat Minangkabau karena disinilah kaum muda di didik di bidang agama dan olah seni bela diri dan ditambah tempat aktivitas

tempat luas di masyarakat.<sup>15</sup> Ungkapan adanya penyatuan antara konsep adat dan Islam seperti konsep “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”<sup>16</sup> adalah ungkapan yang menjelaskan keberhasilan kaum agama dalam memengaruhi kaum adat.

Gerakan pemurnian abad ke-20 digerakkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menggugat kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan landasan ajaran agama seperti kepada Al-Quran dan Hadis. Abad ke-21 gerakan pemurnian juga terjadi lewat Nucholish dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa dalam Islam tidak mengenal konsep real tentang negara. Pancasila yang menjadi sumber landasan bergerak organisasi dan Parpol di Indonesia sebenarnya bersumber kepada Al-Quran dan Hadis.

Gerakan pemurnian Islam berlanjut setelah mendapat momentum ketika sistem Orba hancur. Hancurnya sistem Orba membuat peluang dan ruang bagi gerakan keagamaan yang sebelumnya dimarjinalkan. Momentum hancurnya Orba ini yang membuat terjadi semangat melawan hegemoni pusat yang dominan. Hancurnya Orba membawa semangat Otonomi daerah (Otda) ke seluruh Indonesia tidak terkecuali di Sumbar. Namun Otda di Sumbar direspon dengan semangat kembali ke nagari berbasis surau. Wujud dari semangat itu melahirkan konsep “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABSSBK).

Gerakan pemurnian yang dilakukan KPSI Sumbar mencoba mengembalikan kembali nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat yang sebelumnya berlaku di masyarakat. Gerakan yang ingin menerapkan ABSSBK adalah penyokong cita-cita KPSI.<sup>17</sup> Bagi masyarakat di

---

kaum laki-laki yang belum menikah atau yang sudah bercerai, tetapi menurut Azyumardi Azra, surau adalah konsep yang sebenarnya telah ada pada masa sebelum Islam datang tepatnya zaman Hindu-Budha dan kegiatan kaum cenderung identik dengan arti surau pada masa orang Minangkabau menganut agama Islam. Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modrenisasi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).

<sup>15</sup>Christine Dobbin., *op., cit.*

<sup>16</sup> Namun secara historis mengenai dimana, kapan, siapa yang menyaksikan dan bukti tertulis yang menguatkan perjanjian Sumpah Sati di Bukit Marapalam antargolongan adat dan kaum agama, sehingga bila dijadikan batasan historis, tentu terlalu gegabah.

<sup>17</sup> Namun setelah beberapa kali penulis membaca Pedoman, ADART dan Risalah KPSI penulis tidak menemukan satu fakta pun yang mengingggung ABSSBK sehingga timbul pertanyaan apakah organisasi ini mengerti konsep yang sering diungkapkannya, atau ABSSBK adalah trik untuk menjelaskan identitas gerakannya di tengah keadaan ini.

Sumbar yang identik agama Islam Al-Quran dan Hadis adalah landasan bergerak dan memutuskan sesuatu. Hal inilah yang ingin dikembalikan oleh KPSI Sumbar dengan metode safari dakwah secara konkret dan penyadaran dengan metode diskusi dan seminar gratis.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sistem monolitik-sentralistik yang diterapkan Orba juga menerapkan dua metode pertama, pengabungan partai politik menjadi dua Parpol dan satu golongan. Kedua, Depolitisasi Politik dengan diterapkannya UU No 8 tahun 1985 tentang asas tunggal organisasi dan Ormas. Setelah dikeluarkannya dua metode ini maka keadaan seragam di Indonesia namun semua itu berakhir disaat dikeluarkannya TAP MPR No IX/MPR/1998 tentang perubahan konstitusi di Indonesia.

Setelah berakhirnya sistem Orba maka respon dan peluang makin besar ini dilahirkan lewat lahirnya reformasi. Reformasi memberikan peluang untuk mengubah segala hal karena dua prinsip yakni kebebasan dan persamaan. Reformasi juga memberikan wewenang besar untuk mengurus rumah tangga sendiri yang dikenal dengan Otonomi. Peluang ini ditanggapi oleh pemerintah Sumatera Barat dengan mensosialisasikan konsep “Kembali ke Nagari berbasis Surau” dan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABSSBK).

ABSSBK digunakan KPSI untuk mensosialisasikan visi misalnya yakni menegakkan syariat Islam secara menyeluruh di ranah Minang. KPSI yang mengetahui bahwa adanya penyimpangan atau sudah beralihnya masyarakat yang telah meninggalkan identitasnya dan cenderung menerapkan budaya yang tidak Islami seperti *Valentine day*, dan penerapan salah kaprah dari mandi balimau dan kekeliruan ini yang disadarkan oleh KPSI Sumbar. KPSI menganggap organisasinya mempunyai cara untuk menyembuhkan penyakit bersumber kepada Al-Quran dan Hadis secara harfiah. Konsep “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*” (ABSSBK) adalah trik cerdas untuk merangkai semangat politik dan sosial di Sumbar.

KPSI Sumbar adalah organisasi yang dilahirkan oleh berbagai organisasi yang mempunyai tujuan beragam seperti tujuan dalam bidang keagamaan dan bidang adat. Namun

lewat KPSI Sumbar yang mempunyai visi “menegakkan syariat Islam secara kaffah maka maka visi-visi organisasi pendirinya akan tegak dengan sendirinya karena sumber dari gerakan organisasi pendiri KPSI ini adalah ABSSBK yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis.

Metode yang digunakan KPSI dalam pemurnian agama berupa dalam bidang keagamaan dan sosial seperti dakwah di masjid dan di tempat yang biasa digunakan masyarakat menerapkan kesalahpahamannya dan dalam setiap kegiatannya tersebut umumnya KPSI Sumbar membawa massa mengundang respon masyarakat.

Respon dan pengetahuan masyarakat kepada KPSI bagi masyarakat yang tinggal di mana setiap gerakan KPSI umumnya dilahirkan di Ulak Karang sangat kurang. Masyarakat tidak mengetahui pasti apa bentuk gerakan dan bentuk aktivitas KPSI kecuali penambahan spanduk di syariat center sehingga dari pengalaman ini dapat disimpulkan bahwa gerakan KPSI Sumbar masih bersifat elitis belum masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat luas dan metode yang digunakan belum akrab di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Hal ini dapat menjelaskan bahwa gerakan KPSI tidak terlalu menyentuh kehidupan keseharian masyarakat di Sumbar, walaupun KPSI sudah bergerak pada bidang pendidikan, sosial dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan orang mengenal KPSI masih pada lapisan masyarakat menengah ke atas walaupun gerakan ini mengusung ABSSBK yang dikatakan menyentuh kehidupan masyarakat dan mencoba mensosialisasikan tentang kembali ke nagari ke semua pelosok lewat MTKAAM.

Seharusnya umat agama Islam atau organisasi Islam tidak membuat seolah-olah agama Islam mengajarkan sesuatu dengan jalan yang dijalankan oleh ormas Islam sekarang, dengan mengerahkan massa lalu berorasi orasi dan sebagainya sebagai metode terbaik. Dakwah dalam Islam semestinya lebih mengutamakan substansi bukan formalitas belaka atau bisa dikatakan dakwah Islam lebih menyentuh dan langsung ke subjek pelaku tanpa

menyinggung pelaku sehingga dakwah ini mencerminkan ungkapan “rahmatan lil alamin” atau rahmat bagi sekalian alam. Mas’oed Abidin memberikan petunjuk bahwa ada baiknya organisasi Islam memperlihatkan identitasnya Islamnya dalam berorganisasi dan membawa setiap gerakan menjadi identitas.

Gerakan pemberhentian kegiatan dari masyarakat yang menyimpang dengan penyerahan massa walaupun dengan dalil apa pun akan menuai kecaman. Sebenarnya yang diharapkan tentu empati dari masyarakat karena menegakkan yang benar namun karena metode yang keliru atau kurang tepat malahan menuai antipati dari masyarakat. Tentu bila ini berlanjut maka tuduhan yang menganggap dakwah Islam dilakukan dengan tangan kanan mengengam pedang dan tangan membawa kiri pistol akan mendapatkan kebenarannya di lapangan.

Ada baiknya beberapa tahun ini metode dakwah dengan cara KPSI dievaluasi dengan seksama di bawah koordinator di luar KPSI sendiri sehingga hasilnya dapat merepresentasikan opini masyarakat terhadap gerakan KPSI tiga tahun belakangan. Apapun hasilnya nanti, tentu akan menjadi tolak ukur ke depan bagaimana bertindak dan sebagainya agar cita-cita KPSI tercapai. Bagaimana metode yang mampu menampilkan identitas Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis tentunya. Dengan evaluasi ini diharapkan akan menciptakan metode baru yang lebih efisien dan efektif. Dengan demikian sindiran KPSI adalah organisasi yang mencoba membonceng Islam untuk meraih kekuasaan dapat dibantah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Arsip :

*Pedoman, AD dan ART dan Risalah KPSI Sumbar.* 2006. KPSI Sumbar.  
*Pernyataaan Sikap KPSI Sumbar tentang Enzim yang mengandung babi untuk Jemaah Haji dan pembubaran Ahmadiyah.* 2009. KPSI Sumbar.

### Surat Kabar

*Haluan*, 29 Juli 2006 berjudul “Abu Bakar Ba’asyir: JIL adalah Perpanjangan Tangan Amerika”.  
*Padang Ekpres*, 29 Juli 2006 berjudul “Ba’asyir Lantik KPSI Sumbar”  
*Padang Ekpres*, 16 Juni 2008 berjudul “Ramadhan, FPSI Siapkan 200 Laskar”  
*Padang Ekpres*, 16 Juni 2008 berjudul “KPSI Tuntut Ahmadiyah ke Pengadilan”  
*Padang Ekpres*, 17 Juli 2008 berjudul “KPSI–FUI (Forum Umat Islam) Desak Keppres Pembubaran JAI”.  
*Posmetro*, 29 Juli 2006 berjudul “Amir MMI Abu Bakar Ba’asyir Tiba di Padang : Kita Tidak Pernah Merdeka”  
*Serambi Minang* 29 -3 Agustus 2006 berjudul “Tak Amalkan Syariat Islam Undang Bencana”.  
*Singgalang*, 29 Juli 2006 berjudul “Ba’asyir Kutbah di Masjid Ganting”

### Buku

Abu Bakar bin Hambal. 1993. “Syariah dan Kodifikasi: Pengalaman Singapura,” Sudirman Tebba (Ed) dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara* : Mizan.

Ahmad Syafii Maarif. 2006. *Titik-Titik Kisar diperjalananku*. Yogyakarta : Ombak.

Afan Gaffar Syauckani dan Ryaas Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

A. Jainuri. 1990. *Muhammadiyah : Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad ke dua puluh*. Surabaya : bina Ilmu.

Aqib Suminto. 1989. *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche zaken*. Jakarta : LP3S.

Azyumardi Azra. 2000. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung : Rosdakarya.

\_\_\_\_\_, 2003. *Surau : Pendidikan Islam Tradisonal dalam Transisi dan Modrenisasi*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Bahtiar Effendy. 1998. *Islam dan Negara : Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramadina.

Bambang Sokawati Dewantara. 1989. *Ki Hadjar Dewantara : Ayahku*, Jakarta :Sinar Harapan.

- Budhi Munawar Rachman. 2004. *Islam Plularis : Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta : Srigunting.
- Chistine Dobbin. 1992. *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani*. Terj. Lillian D. Tedjasudhana. Jakarta : INIS.
- Eko Prasetyo. 2003. *Membela Agama Tuhan*. Yogyakarta : Insist Press.
- Fazlur Rahman. 2001. *Gelombang Perubahan dalam Islam : Studi Tentang Fundamentalisme Islam*. Terj. Ibrahim Moosa. Jakarta : Rajawali Press.
- Gusti Asnan. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Gusti Asnan. 2006. *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta : Citra Pustaka.
- Hamka. 1959. *Ajahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perdjungan Kaum Agama di Sumatera*. Djakarta: Widjaya Djakarta.
- Harun Nasution. 1996. *Pembaruan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hassan Muhammad Kemal. 1987. *Modernisasi Indonesia : Respon Cendikiawan Muslim*. Terj. Ahmadie Thaha. Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia.
- Imam Bawani. 1993. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas Asep Gunawan (Ed). 2004. *Artikulasi Islam Kultural dari tahapan Moral ke Priode Sejarah*. Jakarta : Srigunting.
- Jhon Hartanto. S. 1995. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)*. Surabaya : Penerbit Indah.
- Jose Rewu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuntowidjoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang.
- Louis Gottchark. 1986. *Mengerti Sejarah*. (terj) Nugroho Notosutanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Iqbal. 2004. *Rekontruksi Pemikiran Islam : Studi Tentang Kontribusi gagasan Iqbal dalam Pembaruan Hukum Islam* : Kalam Mulia.
- Nadra (Ed). 2006. *Penuntun Penulisan Ilmiah* : Andalas Press.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : Balai Pustaka, Cetakan kedua.

Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Tamrin. 2004. *Gagasan Demokrasi Amien Rais : dalam Teori Politik Islam di Indonesia*. Padang : Andalas University Press.

Taufik Abdullah. 2001. Nina H. Lubis (Ed). *Nasionalisme dan Sejarah. Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung : Satya Historika.

Taufik Abdullah (Ed). 1996. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomiharjo (Eds). 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta : Gramedia Utama.

Yudi Latif dan Idi Subandy Ibarahim (ed). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung : Mizan.

Zenwen Pador. dkk. 2002. *Kembali ke Nagari: Batuka Baruak Jo Cigak*. Jakarta : Grafika.

### **Makalah**

Yudhi Andoni. 2006. "Satu Islam Beda Pemahaman, Satu Iman beda Jalan : Nurcholish Madjid dan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia," *Makalah* disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VII, Jakarta, 14-17 November.

### **Skripsi**

Yudhi Andoni. 2004. "Pemikiran Nucholish Madjid tentang Hubungan Agama dan Negara di Indonesia 1970 – 2003." *Skripsi*. Padang Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas.

Erizal. "Pemikiran politik Kontowidjoyo tentang Islam dan Negara di Indonesia," *Skripsi*. Padang : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Marjoni. 2007. "Dakwah Hizbul Tahril dalam Seruan Penerapan Syariah Islam di Padang," : *Skripsi* Mahasiswa IAIN Imam Bonjol.

Yesmawati. "LKAAM di Sumatera Barat 1966-2004," *Skripsi*. Padang : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas.